

P-ISSN : 2598-5094

E-ISSN : 2656-1999

TIBANNDARU

Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Volume 4 Nomor 1 April 2020

Optimalisasi Peningkatan Dan Penguatan Citra Perpustakaan Melalui Peran Aktif Pustakawan Dalam Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Dianita Rohmatin Setyani Nugroheni Arisalfika Bakti

Implementasi Peraturan Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Mewujudkan Karya Koleksi Nasional

Fahriyah

Representasi *Social Engineering* Dalam Tindak Kejahatan Dunia Maya (Analisis Semiotika Pada Film Firewall)

Imas Rahmadhtul Hidayah

Kesiagaan Pustakawan Dalam Menghadapi Bencana (*Disaster Planning*) Di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta

Ika Laksmiwati, M. Ali Nurhasan Islamy

Pengklasifikasian Karya Sastra Berdasarkan DDC 23

Rotmianto Mohamad

Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS) menggunakan Analisis PIECES Ditinjau dari Persepsi Pustakawan (Studi Kasus Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sri Wahyuni



TIBANNDARU

JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

HALAMAN PENANGGUNG JAWAB

Pelindung

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penasehat

Wakil Dekan Bidang Akademik
Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Penanggung Jawab

Yanuastrid Shintawati, S.IPL., M.Si

Pemimpin Redaksi

Drs. Bakhtiyar, S.Sos., M.IP.

Redaksi Pelaksana

Drs. Yudi Harianto Cipta U., M.IP.,
Drs. Ahmad Sufaidi, M.IP., Dra. Christine Lucia Mamuaya, M.IP., Drs. Bakhtiyar, S.Sos.,
M.IP., Fahriyah, S.Sos., MA., Fahriyah, S.Sos., MA., Rr. Siti Dwijati, S.Sos., M.Si., Dra.
Heddy Poerwandari, M.IP., Wahyu Kuncoro, S.IP., M.IP. Bambang Prakoso, S.Sos., M.IP.,
Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

Mitra Bestari

Imas Maesaroh, P.Hd.
(Pakar Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Ida Fajar Priyanto, P.Hd.
(Pakar Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Dra. Munawaroh, M.Si.
(Kepala Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya)
Fahriyah, S.Sos., M.A.
(Dosen Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

Produksi

Munari, Hendro

Distribusi

HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ilmu Perpustakaan

Terbit setiap : April dan Oktober

Alamat Sekretaris/Redaksi

Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Telp. (031) 5677577. Website: jipfisip.uwks.ac.id.
Email: JIPFisip.@uwks.ac.id.



TIBANNDARU

JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI.....	ii
SEKAPUR SIRIH.....	iii
Optimalisasi Peningkatan dan Penguatan Citra Perpustakaan Melalui Peran Aktif Pustakawan Dalam Aplikasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) <i>Dianita Rohmatin Setyani Nugroheni Arisalfika Bakti</i>	1
Implementasi Peraturan Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Mewujudkan Karya Koleksi Nasional <i>Fahriyah</i>	18
Representasi <i>Social Engineering</i> Dalam Tindak Kejahatan Dunia Maya (Analisis Semiotik Pada Film Firewall) <i>Imas Rahmadhtul Hidayah</i>	30
Kesiagaan Pustakawan Dalam Menghadapi Bencana (Disaster Planning) Di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta <i>Ika Laksmiwati, M. Ali Nurhasan Islamy</i>	48
Pengklasifikasian Karya Sastra Berdasarkan DDC 23 <i>Rotmianto Mohamad</i>	60
Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS) menggunakan Analisis PIECES Ditinjau dari Persepsi Pustakawan (Studi Kasus Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) <i>Sri Wahyuni</i>	68



TIBANNDARU

JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

Sekapur Sirih

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga pada bulan April tahun 2020 ini Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat menerbitkan Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 4 Nomor 1 April 2020.

Dengan terbitnya Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 4 Nomor 1 April 2020, besar harapan kami bawasanya Jurnal ini menjadi salah satu media kreativitas bagi pustakawan, dosen ilmu perpustakaan dan informasi untuk mengeksekusi cakrawala pengetahuannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Semakin banyak pustakawan, dosen ilmu perpustakaan dan informasi, dan pemerhati kepustakawanan yang produktif dengan menulis karya ilmiah maka akan menjadi sebuah keniscayaan sebuah eksistensi profesi ini dalam menyumbang gagasan keilmuan untuk kemajuan peradaban berbangsa dan bernegara.

Semoga Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 4 Nomor 1 April 2020 ini benar-benar bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpustakaan dan informasi. Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang terlibat dalam penulisan Jurnal Tibanndaru: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Volume 4 Nomor 1 April 2020 ini baik dari penulis maupun penerbit. Kami (Tim dan Penulis) tentunya banyak kekurangan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Tim Redaksi

Implementasi Peraturan Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Mewujudkan Karya Koleksi Nasional

¹Fahriyah

¹Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
¹e-mail: fahriyah@uwks.ac.id

ABSTRACT

RI Law No. 4 of 1990 updated with RI Law No. 13 of 2018 is very strategic to be used as an instrument in realizing the work of national collections and preserving the work of national culture of children from all regions of Indonesia from Sabang to Merauke. East Java people, publishers, record works producers, universities, local governments, private institutions/ institutions, information users are classified as active and support the Handover and Save Policy of Print and Record Works managed by the East Java Province Library and Archives Service as a deposit/ storage center East Java area collection. Good collaboration and continuity between the East Java Province Library and Archives Service with related parties have shown an increasing number of deposit collections each year and has contributed to the number of Regional Bibliographic Collections and the Indonesian National Bibliography Collection and the Number of Book Publications in Indonesia, meaning that it has succeeded in realizing the work of national collections and has the work of national culture, especially publications from the East Java region.

Keywords: *implementation of public policies, deposit collections, public libraries*

ABSTRAK

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2018 sangat strategis untuk dijadikan instrumen dalam mewujudkan karya koleksi nasional dan melestarikan hasil karya budaya anak bangsa dari seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Jawa Timur/ penerbit, produsen karya rekam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, institusi/ lembaga swasta, pengguna informasi tergolong aktif dan mendukung kebijakan Serah Simpan karya Cetak serta Karya Rekam yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat deposit/ penyimpanan koleksi daerah Jawa Timur. Kerjasama yang baik dan kontinuitas antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan pihak-pihak terkait telah ditunjukkan perkembangan jumlah koleksi Deposit yang semakin bertambah tiap tahun dan telah menyumbang jumlah Koleksi Bibliografi Daerah dan Koleksi Bibliografi Nasional Indonesia serta Jumlah Terbitan Buku di Indonesia, artinya telah berhasil dalam mewujudkan karya koleksi nasional dan telah melestarikan hasil karya budaya bangsa khususnya terbitan dari wilayah Jawa Timur.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan publik, koleksi deposit, perpustakaan umum*

A. PENDAHULUAN

Di era serba keterhubungan tanpa batas jarak, waktu, dan mudah serta murah akses, menyebarkan dan mendapatkan informasi secara bebas sebagai efek perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi yang pesat yaitu internet, menimbulkan jutaan informasi baru muncul dalam hitungan detik maupun menit. Informasi serta data muncul dalam berbagai format dan berbagai bentuk informasi baik tercetak maupun elektronik. Apalagi pengguna internet Indonesia tergolong yang terbesar di dunia

yaitu menurut hasil riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2015 adalah 88,1 juta orang, pada tahun 2017 adalah 132 juta orang dan tahun 2019 sebesar 171,17 juta orang telah tercatat sebagai pengguna internet di Indonesia. Angka 171,17 juta tersebut menunjukkan bahwa sekitar 64,8 persen penduduk Indonesia sudah dapat mengakses internet ditinjau dari segi jumlah populasi penduduk Indonesia sebesar 264 juta pada tahun 2019. Kemudahan mengakses internet menumbuhkan informasi-informasi dan karya-karya baik populer maupun ilmiah dari anak bangsa Indonesia. Karya anak bangsa dalam berbagai bidang termasuk bidang seni dan pendidikan tergolong sebagai hasil budaya bangsa. (Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)

Hasil karya budaya bangsa mempunyai peranan penting untuk mengukur kemajuan dari segi intelektual suatu bangsa, referensi aspek pendidikan, pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian kemudian penyebaran informasi, pelestarian hasil kebudayaan nasional, dan alat penelusuran terhadap peristiwa catatan sejarah, jejak-jejak adanya perubahan dan perkembangan kehidupan bangsa guna pembangunan serta kepentingan nasional. Hasil budaya bangsa yang dapat diukur berupa karya cetak lalu karya rekam dan sudah terdaftar di perpustakaan nasional.

Untuk itu perlunya upaya dari pihak pemerintah dalam hal ini perpustakaan nasional berupaya mengumpulkan karya cetak lalu karya rekam sebagai karya koleksi nasional hasil budaya anak bangsa Indonesia. Adapun penghimpunan dan pengelolaan koleksi dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas serta fungsi sebagai unit

perpustakaan deposit yakni perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional.

Perpustakaan Nasional yakni lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara (UU RI No. 13/ 2018 Pasal 1 ayat 6). Sedangkan perpustakaan provinsi yakni organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi (UU RI No. 13/ 2018 Pasal 1 ayat 7). (Indonesia., 2018)

UU RI Nomor 4 Tahun 1990 yang diperbarui dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2018 sangat strategis untuk dijadikan instrumen dalam mewujudkan karya koleksi nasional dan melestarikan hasil karya budaya anak bangsa dari seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menganalisis implementasi kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam dalam mewujudkan karya koleksi nasional dan melestarikan hasil karya budaya anak bangsa beserta kendala-kendala yang dihadapi, model yang digunakan adalah model analisis implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980).

Keberhasilan penerapan atau implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dapat dipengaruhi oleh dua variabel fundamental, yaitu isi kebijakan (*Content of Policy*) yang meliputi: (1) Kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*);

(2) Tipe manfaat (*Type of Benefits*); (3) Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*); (4) Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*); (5) Pelaksana program (*Program Implementators*); (6) Sumber daya yang dilibatkan (*Resources Committed*); dan Konteks implementasi (Context of Implementation) meliputi: (1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*); (2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa (*Institution and Regime Characteristic*); (3) Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsiveness*) (Grindle, 1980).

B. KONSEP KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Pengumpulan, pengolahan, penyelamatan, pelestarian serta pemanfaatan aset atau hasil karya anak bangsa sudah dilakukan sejak tahun 1990 dengan diterbitkannya kebijakan resmi pemerintah berupa undang-undang. Dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1990 mengenai Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, bahwa *Karya Cetak merupakan semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum*; Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa *Karya Rekam merupakan semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum*. (Indonesia., 1990)

Seiring dinamisnya perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi undang-undang tersebut diperbarui dan sudah disahkan dalam UU RI Nomor 13

Tahun 2018 mengenai Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam. Dengan disahkannya UU RI No. 13 Tahun 2018 ini, maka UU RI No. 4 Tahun 1990 sudah tidak berlaku lagi. Dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan pada Pasal 1 ayat 1, *Karya Cetak merupakan setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum*; Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa *Karya Rekam merupakan setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum* (Indonesia., 2018). Jenis dan bentuk karya cetak serta karya rekam sudah disebutkan dalam undang-undang sebagai salah satu hasil karya budaya anak bangsa sebagai upaya perwujudan rasa, cipta, dan karsa manusia. Karya-karya ini berperan penting dalam kemajuan pembangunan Indonesia pada umumnya, terutama pembangunan bidang *education, research, pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi dan teknologi serta diseminasi informasi*.

C. KETENTUAN PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Perpustakaan provinsi yang berinduk pada perpustakaan nasional memiliki tugas serta fungsi salah satunya sebagai unit perpustakaan deposit, artinya bahwa perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi berkewajiban mengumpulkan, mengelola, merawat, melestarikan dan menyebarkan hasil karya anak bangsa Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia maupun karya orang asing tentang Indonesia baik yang berkedudukan/berdomisili di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pelaksanaan

peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam harus beraskan pada transparansi, kemanfaatan, aksesibilitas, keselamatan, keamanan, profesionalitas, ketanggapan, antisipasi, dan akuntabilitas. Tujuan pemerintah melaksanakan peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam yakni **pertama**, berupaya mewujudkan karya koleksi nasional serta melestarikannya sebagai hasil karya budaya anak bangsa dalam rangka menunjang kemajuan pembangunan melalui *education, research*, dan pengembangan ilmu pengetahuan komunikasi dan teknologi; dan **kedua**, untuk menyelamatkan hasil karya cetak serta karya rekam dari berbagai ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh peristiwa alam ataupun perbuatan manusia.

Adapun persyaratan dan ketentuan dari penyerahan serta sanksi tercantum dalam UU RI No. 13 Tahun 2018 pada pasal 4-14, sebagai berikut:

1. Setiap penerbit berkewajiban menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari tiap judul karya cetak beserta salinan digitalnya kepada Perpustakaan Nasional serta 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi sesuai dengan tempat domisili Penerbit yang diserahkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
2. Setiap produsen karya rekam yang telah memublikasikan karya rekam yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan IPTEK berkewajiban menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari tiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional serta 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi sesuai dengan tempat domisili produsen karya rekam yang diserahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak dipublikasikan.
3. Karya cetak maupun karya rekam tentang Indonesia yang dihasilkan berdasarkan penelitian oleh WNI dan dipublikasikan di luar negeri juga wajib menyerahkan kepada Perpustakaan Nasional yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Karya cetak maupun karya rekam tentang Indonesia yang dihasilkan oleh WNA dan diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri juga wajib menyerahkan kepada Perpustakaan Nasional yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Setiap penerbit serta produsen karya rekam yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut mendapat pembinaan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi selama 2 (dua) bulan dan jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif yaitu pembekuan usaha; teguran tertulis; sampai pencabutan izin yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Perguruan tinggi, kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, yang telah menerbitkan karya cetak berkewajiban menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari tiap judul karya cetak, dan memublikasikan karya rekam juga wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari tiap judul karya rekam ke Perpustakaan Nasional yang diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.
7. Pemerintah Daerah dan DPRD menerbitkan karya cetak berkewajiban menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari tiap judul karya cetak, dan memublikasikan karya rekam juga wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari tiap judul karya rekam ke Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Provinsi sesuai dengan tempat domisili yang diserahkan

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan.

8. Pelaksanaan kegiatan penyerahan karya cetak serta karya rekam kepada Perpustakaan Nasional ataupun Perpustakaan Daerah dapat dilakukan secara langsung diserahkan atau melalui jasa pengiriman dengan pihak ketiga setelah adanya proses kerjasama.

D. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah salah satu pelaksana kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Adanya perpustakaan mendorong akan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Sehubungan dengan itu, maka tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada masyarakat pemustaka, untuk meningkatkan masyarakat agar gemar membaca, serta memperluas wawasan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sangat perlu ditumbuhkembangkan kegiatan dan nantinya menjadi budaya gemar membaca melalui *library*, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar sepanjang hayat (*long life education*).

Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan. Adapun fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah: (a) Perumusan mengenai kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan; (b)

Pemberian dukungan tentang penyelenggaraan pemerintahan lokal; (c) Pembinaan serta pelaksanaan tugas disesuaikan dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas lain atas perintah Gubernur, pengaturan tentang uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 108/2008 tentang struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pimpinan atau top management dalam hal ini yaitu kepala-unsur pimpinan dalam manajemen menengah (*middle management*) ada 1 (satu) sekretaris dan 7 (tujuh) bidang yang dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari: Fungsi Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, dan Sub Bagian Penyusunan Program serta Sub Bagian Keuangan.

1. Fungsi pada Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa Kearsipan memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Publikasi, Promosi, Perpustakaan; (b) Jasa Kearsipan.
2. Fungsi pada Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Deposit dan Preservasi; (b) Pengolahan Bahan Pustaka.
3. Fungsi pada Bidang Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Sumber Daya Manusia; (b) Kelembagaan Perpustakaan.
4. Fungsi pada Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Layanan Perpustakaan; (b) Otomasi Perpustakaan.
5. Fungsi pada Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Pengolahan dan

- Penyimpanan Arsip Inaktif; (b) Penyusutan dan Pemeliharaan.
6. Fungsi pada Bidang Penyelamatan Arsip Statis memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Akuisisi; (b) pengolahan dan Pelestarian.
 7. Fungsi pada Bidang Pembinaan dan Pemasarakatan Kearsipan memiliki 2 (dua) Sub Bidang yaitu: (a) Pembinaan Kearsipan; (b) Pemasarakatan Kearsipan.

Pembagian unsur pada Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis merupakan cerminan dari kelompok orang menurut keahlian profesional di bidang perpustakaan serta kearsipan (Abisulistyo, 2016).

E. IMPLEMENTASI PERATURAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Menurut tokoh Grindle (1980:8) bahwa keberhasilan penerapan atau implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua variabel, yakni:

1. *Content of Policy*/ Isi kebijakan meliputi:
 - (1) *Interest Affected*/ Kepentingan yang mempengaruhi;
Suatu kebijakan/peraturan tidak akan pernah lepas dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan instansi, institusi, pelaksana kebijakan serta sasaran dari isi kebijakan. Oleh sebab itu kepentingan berbagai pihak yang terangkum dalam isi kebijakan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak serta Karya

Rekam adalah negara, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, penerbit, dan produsen karya rekam dalam hal ini untuk mewujudkan koleksi nasional.

- (2) *Type of Benefits*/ Tipe manfaat; Kebijakan atau program yang telah dirancang agar tercapai manfaat dalam jangka panjang akan lebih sulit untuk diterapkan daripada kebijakan jangka pendek. Pada konteks rumusan kebijakan/peraturan yang memiliki manfaat segera atau memberikan efek langsung bagi kepentingan masyarakat sebagai sasaran kebijakan/peraturan akan lebih mendapatkan dukungan dengan baik daripada kebijakan yang dampaknya tidak langsung. Manfaat terkait implementasi kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu dimilikinya koleksi Deposit Jawa Timur yang berkembang menjadi koleksi *Local Content* Jawa Timur, dan koleksi Pusaka Jawa Timuran.
- (3) *Extent of Change Envision*/ Derajat perubahan yang ingin dicapai;
Perubahan yang diharapkan merupakan tingkat perubahan yang diharapkan dari program tertentu yang memerlukan adaptasi untuk diterima dan menimbulkan perubahan sebagaimana telah ditetapkan

dalam isi kebijakan. Namun ada pula program yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dan memperoleh dukungan serta partisipasi yang cukup dari pihak-pihak penerima kebijakan. Kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam ingin menciptakan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan yaitu penerbit, produsen rekaman, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, institusi/ lembaga swasta, dan sejenisnya untuk menyerahkan hasil terbitannya dari wilayah Jawa Timur ke Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

- (4) *Site of Decision Making/* Letak pengambilan keputusan; Ruang lingkup pengambilan keputusan terkait dengan seberapa jauh kebijakan/peraturan didesentralisasikan untuk pelaksanaannya atau disisi lain seberapa besar kendali dari pusat politik atau peran birokrasi negara terhadap suatu kebijakan. Semakin besar kebijakan melibatkan kontrol pusat dan banyak unsur birokrasi terlibat dalam pengambilan keputusan, maka akan semakin sulit pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan terkait kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam adalah ada pada perpustakaan provinsi dan perpustakaan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

- (5) *Program Implementators/* Pelaksana program; Kapasitas ukur pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Kreativitas dan inovasi para pelaksana, keahlian yang dimiliki, dedikasi kuat pada tugas yang diemban, dukungan politik dan akses sumber daya yang memadai akan meningkatkan kemampuan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan para pelaksana program dalam merumuskan tujuan akan sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Pelaksana program kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, yang memiliki Sub Bidang Deposit dan Preservasi serta Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka.
- (6) *Resources Committed/* Sumber daya yang dilibatkan; Sumber daya yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan/peraturan berkaitan dengan lembaga atau instansi yang memiliki wewenang dan akses yang cukup guna mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya manusia bagian Deposit, Pengembangan dan Pengolahan bahan Pustaka adalah 6 orang pustakawan dari keseluruhan sumber daya manusia

sebanyak 216 orang di tahun 2018 yang tercatat pada Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

2. *Context of Implementation/* Konteks implementasi, yang meliputi:

(1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved/* Kepentingan, Kekuasaan, dan Strategi Aktor yang terlibat;

Analisis pada pelaksanaan program guna menilai kondisi para aktor, strategi, kepentingan serta karakteristik rezim yang saling berinteraksi. Dalam hal ini pertimbangan mengenai indikator-indikator kepentingan, kewenangan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi/penerapan serta karakteristik lembaga penguasa menjadi ukuran keberhasilan terlaksananya isi kebijakan. Adapun hasil pelaksanaan kebijakan serah simpan karya cetak serta karya rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sudah terkumpul, tercatat, terolah, terjaga, dan dilayanan dengan baik sejak tahun 2012 sampai sekarang. Bagian Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menjalankan tugas serta fungsinya dengan mengirim surat permintaan koleksi yang diterbitkan maupun yang direkam secara kontinyu di awal tahun kepada penerbit,

produsen rekaman, perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga swasta di seluruh wilayah Jawa Timur.

(2) *Institution and Regime Characteristic/* Karakteristik Lembaga dan Penguasa;

Secara kelembagaan perpustakaan provinsi sesuai dengan pasal 1 dalam UU No. 4 tahun 1990 dan UU No. 13 tahun 2018 merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah daerah/lokal dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan deposit, perpustakaan rujukan, perpustakaan pelestarian, perpustakaan penelitian, dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Khususnya bagian Deposit, Pengembangan dan Pengolahan bahan Pustaka di masing-masing perpustakaan provinsi.

(3) *Compliance and Responsiveness/* Kepatuhan dan Daya Tanggap;

Institusi atau lembaga publik seperti perpustakaan harus tanggap/responsif pada kebutuhan masyarakat atau pihak yang akan dilayani secara memadai. Masalah yang berkaitan erat dengan implementasi yaitu menjaga keseimbangan dalam memastikan ketanggapan para pelaksana untuk membuktikan dukungan, fleksibilitas, dan umpan balik, sementara pada saat yang sama menjaga kontrol yang cukup kuat atas distribusi sumber daya dalam mencapai

tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kecerdasan politik cukup besar untuk memperhitungkan kemampuan respon, kapasitas dan keterampilan aktor yang terlibat dalam mencapai sasaran program yang berkaitan dengan lingkungan kebijakan. Masyarakat Jawa Timur memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang baik terhadap Undang-undang serah simpan karya cetak serta karya rekam, terbukti dengan semakin berkembangnya dari tahun ke tahun jumlah koleksi Deposit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 berjumlah 284 judul; 392 eksemplar menjadi 5.214 judul; 6.171 eksemplar di tahun 2016.

Perpustakaan Nasional yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit dapat terwujud dan digunakan sebagai cerminan atau gambaran seluruh terbitan Indonesia berupa karya tulis, karya cetak maupun karya rekam termasuk naskah kuno/manuskrip dari tahun ke tahun.

F. HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Adapun hambatan yang muncul saat pengumpulan/ penghimpunan seluruh terbitan/ karya cetak maupun karya rekam di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- a. Disperpusip Jatim sudah melakukan penghimpunan seluruh terbitan Jawa Timur berupa karya tulis, karya cetak maupun karya rekam sesuai

- perundang-undangan yang telah berlaku namun belum seluruh terbitan dapat diserahkan/ disimpan dalam perpustakaan.
- b. Belum adanya kesadaran dari penerbit pemerintah/swasta untuk melaksanakan Undang-undang Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam.
- c. Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan tergolong kurang dan belum secara menyeluruh dilakukan di wilayah Jawa Timur.
- d. Penyerahan terbitan dari pihak penerbit dan sejenisnya terkendala pada biaya pengiriman dari daerah ke Disperpusip Jawa Timur. Sementara ini yang menanggung biaya adalah pihak penerbit sendiri.

G. STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Strategi yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengumpulan/ penghimpunan seluruh terbitan/ karya cetak serta karya rekam di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. Melakukan pendataan seluruh penerbit, produksi rekaman, perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, lembaga swasta di seluruh wilayah Jawa Timur.
- b. Mengirimkan surat permintaan hasil penerbitan atau hasil produk rekaman ke seluruh penerbit, produksi rekaman, perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah daerah, lembaga swasta di seluruh wilayah Jawa Timur secara kontinyu.

- c. Membentuk tim khusus atau kelompok pustakawan yang menangani program pengumpulan koleksi deposit untuk setiap lembaga tertentu, misalnya Tim Koleksi Deposit Pemerintah Daerah, Tim Koleksi Deposit Perguruan Tinggi, dan seterusnya.
- d. Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam di Wilayah Jawa Timur.
- e. Kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dengan pihak jasa pengiriman barang domestik milik pemerintah agar proses pengiriman koleksi deposit dari penerbit/produksi rekaman/ perguruan tinggi negeri dan swasta/pemerintah daerah/ lembaga swasta di seluruh wilayah Jawa Timur berjalan dengan lancar dengan biaya yang murah.

H. REKOMENDASI IMPLEMENTASI PERATURAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK SERTA KARYA REKAM

Setelah melakukan analisa, maka rekomendasi implementasi kebijakan/peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dalam upaya mewujudkan karya koleksi nasional dan melestarikan hasil karya budaya bangsa agar lebih efektif dan berhasil secara maksimal, dan berdasarkan pada pengembangan dari model Grindle yaitu:

- A. *Content of Policy*/ Isi kebijakan, meliputi:
 - (1) *Interest Affected*/ Kepentingan yang mempengaruhi negara, dalam unsur ini perpustakaan

nasional, perpustakaan provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, penerbit, dan produsen karya rekam secara terpadu, terkendali dan konsisten melaksanakan isi undang-undang serah simpan karya cetak serta karya rekam demi terwujudnya koleksi daerah maupun koleksi nasional;

- (2) *Type of Benefits*/ Tipe manfaat, dalam unsur ini perpustakaan provinsi terus berusaha lebih optimal dengan berbagai cara baik melalui cara konvensional maupun lewat media digital demi terwujudnya koleksi *Local Content* Jawa Timur dan koleksi Pusaka Jawa Timuran yang berguna untuk melestarikan seluruh karya khusus dari Jawa Timur;
- (3) *Extent of Change Envision*/ Derajat perubahan yang ingin dicapai disusun dengan jelas, dalam unsur ini perpustakaan provinsi menyusun program kerja, tujuan yang ingin dicapai beserta panduannya mengenai proses pelaksanaan peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam;
- (4) *Site of Decision Making*/ Letak pengambilan keputusan, dalam unsur ini perpustakaan provinsi lebih terorganisasi dan koordinasi dengan perpustakaan nasional mengenai aktor-aktor pengambil keputusan dengan jelas dan bertanggungjawab;
- (5) *Program Implementators*/ Pelaksana program, dalam unsur ini perpustakaan provinsi lebih terstruktur mengenai *job description* masing-masing bidangnya dalam pelaksanaan

peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam;

- (6) *Resources Committed/* Sumber daya yang dilibatkan, dalam unsur ini perpustakaan provinsi menggunakan sumber daya yang dimilikinya (SDM, Dana, Sarana, Prasarana, dll.) untuk digunakan dalam keberhasilan pelaksanaan peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam.

B. *Context of Implementation/* Konteks implementasi, meliputi:

- (1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved/* Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat, dalam unsur ini perpustakaan provinsi lebih menggunakan kekuasaannya melalui surat permintaan kepada semua pihak yang telah terdaftar untuk mematuhi peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam disertai manfaat beserta sanksinya dengan strategi konvensional maupun melalui komunikasi media digital dengan tujuan semua pihak taat pada kebijakan dan terwujudlah karya koleksi daerah dan koleksi nasional;
- (2) *Institution and Regime Characteristic/* Karakteristik Lembaga dan Penguasa, dalam unsur ini perpustakaan provinsi sebagai lembaga layanan publik lebih mengedepankan pada prinsip layanan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Koleksi Deposit secara khusus koleksi daerah;
- (3) *Compliance and Responsiveness/* Kepatuhan dan

Daya Tanggap dari pihak-pihak terkait, dalam unsur ini perpustakaan provinsi dan pihak-pihak seperti penerbit, produsen karya rekam, Perguruan tinggi, kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama untuk patuh dan memiliki daya tanggap dalam melaksanakan peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam secara lebih optimal.

- C. *Communication/* Komunikasi, dalam unsur ini perpustakaan provinsi melakukan sosialisasi dan koordinasi antar aktor pelaksana program dengan pihak-pihak terkait peraturan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi baik yang konvensional (surat, telepon, telegram, dll.) maupun digital (*flyer informasi dan video dalam facebook, youtube, whatsapp, twitter, instagram, dll.*).

- D. *Monitoring and Evaluation/* Monitoring dan Evaluasi, dalam unsur ini perpustakaan provinsi dapat melakukan monitoring/pengawasan secara internal dan evaluasi secara terjadwal, kontinyu minimal tiap 6 bulan sekali tentang pelaksanaan peraturan serah simpan karya cetak serta karya rekam.

I. KESIMPULAN

Masyarakat Jawa Timur/ penerbit, produsen karya rekam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian, non kementerian, institusi/ lembaga swasta, pengguna informasi tergolong aktif dan

mendukung kebijakan Serah Simpan karya Cetak serta Karya Rekam yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat deposit/ penyimpanan koleksi daerah Jawa Timur walaupun terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi. Perlunya penyusunan strategi yang terstruktur dan terencana dengan baik proses pelaksanaan serah simpan karya cetak serta karya rekam di wilayah Jawa Timur. Kerjasama yang baik dan kontinuitas antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah ditunjukkan dengan jumlah koleksi Deposit yang terus tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Tercatatnya koleksi Deposit Jawa Timur telah menyumbang secara kuantitas jumlah koleksi Bibliografi Daerah dan Bibliografi Nasional Indonesia serta meningkatkan jumlah produksi atau terbitan buku/ karya cetak maupun karya rekam secara nasional yang artinya telah mendukung terwujudnya koleksi nasional dan telah melestarikan hasil budaya bangsa khususnya di wilayah Jawa Timur.

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Materi Pendukung Literasi Digital: Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kemendikbud RI.

<http://disperpusip.jatimprov.go.id/images/renstra/RENSTRA%20BAPERSIP%202014-2019.pdf>

DAFTAR PUSTAKA

- Abisulistyo, K. (2016). *Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Koleksi deposit Berdasarkan Keputusan MEN.PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Indeks Keouasan Masyarakat*. Surabaya: FISIP UWKS.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Indonesia. (1990). *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*.
- Indonesia. (2018). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*.